

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teoritis dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Neo Realisme

Teori Neorealisme merupakan pembaruan dari teori Realisme. Realisme percaya bahwa kekuasaan selayaknya seperti mata uang internasional. Realisme selalu berbicara mengenai peran ekonomi dan militer yang dapat memberikan pengaruh dalam politik internasional. Tidak hanya memastikan jumlah militer dan kemampuan ekonomi yang besar, Realisme juga berargumen bahwa penting bagi suatu negara untuk memastikan negara lain tidak menggeser posisi kekuasaan yang menguntungkan bagi mereka. Bagi kaum Realis, politik internasional identik dengan mencari kekuasaan (*power*). Pemikir Realis, Hans Morgenthau berargumen bahwa pada dasarnya kekuasaan merupakan sifat alami manusia sejak lahir. Ia juga menambahkan negara yang memiliki kekuasaan merupakan negara yang dipimpin oleh individu-individu yang bertekad untuk mendominasi para pesaing-pesaingnya di kancah perpolitikan internasional. (Jackson & Sorensen 1999 )

Teori Realisme melihat atau menganalisa terhadap tindakan individu atau negara. Individu dan negara dalam teori Realisme didasarkan pada sifat alami manusia yang dapat memberikan pengaruh pada sebuah sistem. Sedangkan, teori neorealisme memfokuskan pandangannya bahwa dalam tatanan dunia, sistem global lah yang mempengaruhi tindakan sebuah aktor yang dalam hal ini individu atau negara. Neorealisme juga percaya terhadap sistem yang anarki dimana tidak ada pemimpin tertinggi diatas suatu negara. Sama halnya dengan teori realisme, neorealisme menjelaskan bahwa negara tetap menjadi aktor utama dalam melaksanakan sebuah tindakan dengan berdasar pada prinsip '*self help*' untuk dapat bertahan hidup atau '*survive*'. Namun, yang menjadi perbedaan yakni teori neorealisme tidak mengangkat dari masalah yang dihadapi oleh aktor melainkan bagaimana kemampuan aktor tersebut dalam mengatasi permasalahan yang di hadapinya. Dari kemampuan yang aktor tersebut miliki yang kemudian dapat menentukan posisinya pada sistem global. (Waltz, 1979)

Waltz menciptakan model struktural dalam hubungan internasional dengan memperkenalkan sebuah cara pandang untuk memahami kompleksitas terhadap realitas yang

terjadi dalam dunia internasional. Dalam teorinya, Waltz hanya berfokus pada proses yang terjadi pada tingkat internasional dengan menghilangkan proses yang berasal dari tingkat nasional atau negara (Waltz, 1979).

Tujuan utama negara adalah mengejar kepentingan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dalam bertahan hidup negara tidak bisa mengandalkan negara lain atau pihak lain, sehingga mereka harus bertahan hidup sendiri (*self-help*). Waltz mengakui dunia yang Anarki sebagai bagian dari *ordering principle* dalam sistem internasional dimana situasi anarki ini merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada satu negara atau suatu pihak yang mendominasi secara domain dalam hubungan internasional. Dalam hal ini bukan berarti tidak ada peran dari pihak lain, Waltz juga mengakui peran pihak-pihak lain dalam pemikirannya, namun mereka hanya sebatas sebagai agen yang secara instrumental yang digunakan untuk melayani tujuan prinsip negara (Waltz, 1979). Power atau kekuasaan menurut teori Neorealisme menjadi faktor pendukung dalam sistem global yang menuntut untuk dapat bertahan hidup atau '*survive*'. Akan tetapi, orientasi aktor atau negara dalam kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki dalam menghadapinya cenderung berbeda-beda. Orientasi yang berbeda pada setiap aktor atau negara yang memicu mereka untuk mencapai *Balance Of Power* atau perimbangan kekuasaan karena adanya sistem global yang menuntut suatu negara untuk melakukan. (Waltz, 1979).

Neorealisme berbicara mengenai yang berisikan upaya mencari kekuasaan atau *struggle for power* sebagai hasil daripada struktur dominan atau anarki dengan menunjukkan dinamika relasi antar komponen dalam sistem dimana negara menjadi unit utama, yang masing-masing berupaya untuk selamat dalam kompetisi internasional bercirikan pola distribusi kekuasaan khas (kemampuan unit) (Booth dalam Dugis, 2016). Berdasarkan argumen Booth tersebut, terdapat empat argumen utama mengenai teori neorealisme, yaitu penekanannya pada struktur internasional yang anarkis, negara dianggap sebagai aktor utama, upaya masing-masing unit (negara) untuk mencari keselamatan diri (*survival*), serta distribusi kekuasaan yang berdasarkan kemampuan/ kapabilitas masing-masing unit (negara) (Dugis, 2016).

Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perkembangan teori Neorealisme adalah John J. Mearsheimer.

Mearsheimer kemudian membentuk lima asumsi dasar yang ia gunakan untuk menjelaskan tentang sistem internasional, (Mearsheimer, 2006) asumsi tersebut yaitu :

1. *Great power* merupakan pemeran utama dalam perpolitikan dunia yang beroperasi dalam sistem internasional yang anarki. Anarki berarti tidak ada otoritas tertinggi yang berdiri di atas negara, berbeda dengan hirarki yang memiliki otoritas tinggi yang terpusat.
2. Setiap negara memiliki kemampuan *ofensif* atau menyerang, dengan kata lain setiap negara memiliki kekuatan untuk menimbulkan kerugian terhadap negara lain yang tentunya dapat berubah dari waktu ke waktu.
3. Suatu negara tidak akan pernah mengetahui maksud atau tujuan dari negara lain, apakah ia bermaksud untuk menyerang atau justru ingin mengubah *balance of power* atau mereka akan diam dan bertahan dengan kondisi yang telah dimiliki.
4. Tujuan utama negara adalah bertahan hidup. Setiap negara akan berusaha untuk mempertahankan wilayah mereka demi keberlangsungan bertahan hidup. Di sisi lain, negara bias mengejar berbagai kepentingan seperti Hak Asasi Manusia dan kemakmuran bagi negaranya, namun tujuan tersebut tidak dapat membawa suatu negara bertahan hidup yang terpenting adalah bagaimana suatu negara dapat bertahan (*Survive*).
5. Negara merupakan actor yang rasional, dimana mereka dapat menggunakan strategi-strategi dalam bertahan hidup.

### **2.1.2. Konsep Defensif Realisme**

Neorealisme percaya bahwa kekuatan merupakan sebuah alat untuk mencapai pertahanan negara (*survival*), dalam hal ini terbagi menjadi dua pemahaman yakni *defensive structural realism* dan *offensive structural realism*. *Offensive structural realism* beranggapan bahwa diperlukan peningkatan kekuatan supaya meraih posisi hegemoni dalam sistem internasional. Dengan menjadi hegemon, negara dapat memastikan posisi amannya untuk bertahan dalam sistem yang anarki, sedangkan *defensive realism* beranggapan bahwa jika suatu negara memaksimalkan kekuatannya dan menyerang maka negara tersebut akan membahayakan keamanannya (Dugis, 2016).

*Neorealism defensive* atau biasa disebut dengan defensif realisme merupakan konsep besar dengan banyak varian argumen di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada argumen

Robert Jervis (1978) mengenai *security dilemma* dan argumen Waltz (1979) mengenai konsep *balance of power*. Secara umum, realisme defensif menyatakan bahwa sistem internasional memang memberi ruang kepada negara untuk melakukan perilaku agresif. Asumsi realisme defensif mengatakan, kondisi sistem yang anarkis (tidak ada kekuasaan yang dominan) memberi ruang bagi negara-negara kuat untuk meningkatkan kondisi keamanannya. Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak pula pada kualitas keamanan negara-negara lain. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa naiknya kualitas keamanan di negara A (melakukan peningkatan kapasitas militer) akan berdampak terhadap menurunnya kualitas keamanan di negara B (kondisi terancam). Konsep ini dikenal dengan kondisi *security dilemma* atau dilemma keamanan (Jervis, 1978).

Pandangan realisme ofensif, negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agresif karena pengambil kebijakan dalam negara-negara tersebut mempunyai pemahaman bahwa perilaku agresif adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara (*survival*). Berbeda dengan realisme defensive, realisme defensif tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan realisme ofensif. Pandangan yang diajukan oleh realisme defensif adalah dengan mengambil kebijakan yang cenderung moderat, tidak selalu agresif dan tidak selalu pasif, sebagai cara dan upaya paling efektif dalam menjamin kondisi keamanan dan keselamatan negara. Realisme defensif mengatakan bahwa negara-negara kuat (*superpower*) seharusnya lebih membatasi diri untuk tidak secara masif mengejar *power* melalui berbagai macam kebijakan, seperti: militer, ekonomi, serta diplomasi. Pandangan realisme defensive juga merupakan kritik terhadap realisme klasik yang mengatakan bahwa tindakan negara harus selalu agresif untuk menjamin posisi negara tersebut dalam politik internasional. (Dugis, 2016)

Pada cakupan realisme defensif, Jervis dan Van Evera sering dikaitkan sebagai pendukung argument Waltz (Dugis, 2016). Jervis menyatakan bahwa negara harus mengimbangi antara strategi ofensif dan defensif, namun faktanya strategi ofensif sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan negara bertahan dari ancaman eksternal. Pandangan Jervis tersebut mengindikasikan keberpihakannya terhadap posisi realisme defensif yang menekankan pembatasan kekuatan/kekuasaan dari aktor internasional (negara) (Jervis, 1978). Selanjutnya, Jervis juga menjelaskan pentingnya strategi ofensif untuk tujuan defensif dalam kaitannya

dengan dilema keamanan yang terjadi di dalam struktur internasional. Negara mempunyai kecenderungan untuk bertindak ofensif terhadap negara lainnya dengan alasan meningkatkan keamanan. Di sisi lain negara juga mempunyai kecurigaan terhadap negara lain karena seringkali intensi negara dalam melakukan tindakan di level internasional tidak dapat diidentifikasi dengan jelas (Jervis 1978). Sedangkan menurut Van Evera, pada titik tertentu negara harus mengambil strategi yang agresif untuk mencegah terjadinya agresi di masa yang akan datang. Argumen tersebut cocok bila dijalankan oleh negara yang tidak secara alami mempunyai wilayah geografi yang mampu melindungi dari serangan negara lain. Kedua penstudi tersebut sama-sama menggunakan realisme defensif sebagai pijakan untuk argumentasinya (Van Evera dalam Dugis,2016).

.Berbagai macam pemikiran realisme defensif ini menekankan bahwa negara tidak seharusnya melakukan pemaksimalan kekuatan secara agresif atau bersifat ofensif, namun hanya sebatas mencari kekuatan yang tepat sebagai upaya mempertahankan posisinya (Waltz, 1979). Apabila ada negara yang meningkatkan kondisi keamanannya, maka negara lain akan melakukan penyeimbangan (*balancing*) yang justru dapat berpotensi menimbulkan konflik antara negara yang meningkatkan kekuatannya dengan negara lain yang melakukan penyeimbangan. Berdasarkan argumen Van Evera mengenai *offence-defencebalance*, maka bertahan menjadi opsi yang lebih rasional karena menyerang lebih membutuhkan sumberdaya yang cukup banyak daripada bertahan, sehingga negara yang diasumsikan rasional akan membatasi diri agar tidak menciptakan konflik besar(Van Evera dalam Dugis,2016).

Dapat disimpulkan bahwa penitikberatan pemikiran ofensif dan defensif terletak pada bagaimana negara menyikapi situasi internasional yang anarki. Dalam pemikiran ofensif, setiap negara memiliki kecenderungan untuk berusaha mencapai kepentingan nasionalnya melalui *struggle for power* dengan hegemoni atau dominasi atas negara lain. Sedangkan pemikiran defensif mempercayai bahwa negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar akan mengimbangi kekuatan dengan musuhnya, sedangkan negara yang cenderung lemah akan memanfaatkan aliansinya dalam upaya mencari perlindungan atau *status quo*(Van Evera dalam Dugis,2016).

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori Neorealisme serta konsep Defensif realisme yang dikemukakan Kenneth Waltz. Teori Neorealisme menjelaskan tentang

situasi internasional yang anarki yang membuat negara di dunia selalu mengupayakan bertahan hidup melalui pencarian kekuasaan atau *struggle for power*. Dalam penjelasannya, Kenneth Waltz menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep Defensif realisme. Pemikiran ini mengemukakan bahwasanya dalam situasi internasional yang anarki, negara tidak seharusnya memaksimalkan kekuatannya sehingga bersifat menyerang atau *offensive* melainkan mencari kekuatan yang tepat atau dengan kata lain bertahan. Berkaitan dengan hal ini, Jepang tentunya akan melakukan sebuah upaya untuk menyeimbangi situasi dalam merespon peningkatan militer China. Dalam upaya nya tersebut, China melakukan revisi ulang *Guidelines* pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat untuk bertahan dalam situasi internasional yang anarki.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

### **2.2.1. Jurnal “Latar Belakang Jepang Menyepakati Revisi Japan-US Defence Guidelines Pada Tahun 2015”.**

**Oleh : Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati**

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan kenyataan alasan mengapa Jepang merevisi *Japan-US Defense Guidelines* pada tahun 2015. Menurut penulis, Jepang mengambil keputusan dalam merevisi pedoman pertahanan dengan AS disebabkan oleh perubahan politik internasional yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah pada saat itu sehingga perubahan politik internasional yang fluktuatif tersebut berdampak dan sangat mempengaruhi. Dalam kawasan Asia Timur, peningkatan militer China serta kapabilitasnya menjadi negara besar dan uji coba nuklir milik Korea Utara yang sulit untuk dibendung menjadi dua alasan utama mengapa Jepang harus mngambil langkah yang nyata. Selain itu, peneliti dalam tulisan ini mencoba untuk memaparkarkan mengapa AS menjadi salah satu negara yang menjadi teman Jepang dalam melawan China dan Korea Utara di kawasan Asia Timur.

Secara umum, penulis sudah cukup baik dalam menerangkan latar belakang Jepang merevisi *Guidelines* pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat, namun penulis tidak mengemukakan lebih lanjut bagaimana pengaruh *Guidelines* tersebut terhadap pertahanan Jepang sedangkan, jika dilihat lebih jauh lagi Jepang mendapatkan berbagai macam manfaat dari pembaruan *Guidelines* pertahanan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, variabel ancaman dalam penelitian ini menggunakan dua negara, yaitu: China dan Korea Utara. Di sisi lain, antara kedua negara ini China cenderung lebih merugikan Jepang melalui kebijakan-kebijakan sepihaknya

dibandingkan kepemilikan nuklir Korea Utara. Hal ini dapat dilihat dari tingkat intensifitas antara Jepang dan China yang lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Utara.

### **2.2.2 Jurnal “Aliansi Keamanan Amerika Serikat dengan Jepang dalam kebijakan Rebalancing di kawasan Asia Pasifik Pada Tahun 2011-2016”.**

**Oleh : Agustinus Tri Darma Kusuma, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawiti Resen.**

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan legitimasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang menurun karena peningkatan ekonomi dan militer China di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, ADIZ (*Air Defense Identification Zone*) dan A2/AD (*Anti-Access and Area Denial*) membuat posisi China semakin kokoh di Asia. Dalam hal ini Amerika Serikat tidak ingin posisinya sebagai *Great Power* jatuh di bawah pengaruh China. Amerika Serikat melihat Jepang merupakan jalur masuk yang baik untuk melakukan *rebalancing* di kawasan karena merupakan negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk melakukan modernisasi militer Jepang dibawah naungan aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang guna mencegah pengaruh China di Asia Pasifik.

Penelitian ini sudah cukup baik dalam menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mencoba melakukan *rebalancing* di Asia Pasifik melalui pendekatan bantuan militer ke Jepang yang juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di Pasifik. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi penelitian ini belum menjelaskan kerangka yang jelas mengenai kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat sehingga kedua negara dapat bekerjasama, khususnya dalam bidang pertahanan. Kemudian, penelitian ini mengambil cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu Asia Pasifik, sedangkan pada dasarnya wilayah Asia Timur lah yang lebih cocok dijadikan landasan wilayah kajian karena penelitian ini hanya menekankan China, Korea Utara, dan Jepang sebagai negara yang ingin dilihat.

### **2.2.3. Skripsi "Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014-2017".**

**Oleh: Muhhamad Unggul Waskito**

Dalam penelitian ini, penulis menilai terjadi *balance of power* di kawasan Asia Pasifik. *Balance of power* ini terjadi karena terdapat *security dilemma* antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan China yang dianggap merugikan negara-negara Asia Pasifik lainnya sehingga memaksa mereka untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer. Jepang sendiri yang merupakan negara tetangga dari China mengambil langkah dalam menghadapi hal tersebut, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan dengan interpretasi ulang pasal 9 dan penguatan kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat merupakan bentuk serta pemberian bantuan militer terhadap negara-negara yang bersengketa dengan China, seperti: Filipina dan Vietnam merupakan bagian dari respon peningkatan militer China di kawasan Asia Pasifik.

Penelitian ini secara keseluruhan mencoba mengungkapkan bagaimana terjadinya *balance of power* di Kawasan Asia Pasifik melalui peningkatan kapabilitas militer Jepang yang secara nyata di wujudkan melalui bantuan militer yang diberikan serta kerjasama-kerjasama yang dilakukan antara Jepang dengan negara Asia Pasifik. Namun, penelitian ini belum maksimal dalam menjelaskan ancaman-ancaman China yang kredibel sehingga ancaman-ancaman yang ditawarkan penulis belum jelas. Selain itu, penelitian ini belum menjelaskan secara baik bagaimana pengaruh yang diberikan Jepang terhadap stabilitas keamanan Kawasan karena hanya berfokus pada kerjasama-kerjasama dan bantuan militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik. **2.2.4**

### **Buku “*History of US-Japan Relations : From Perry To The Present*”**

**Penulis : Makoto Likobe**

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana relasi dan sejarah serta dinamika antara Jepang dengan Amerika Serikat. Penulis menjelaskan bahwa hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat terbangun sejak Komodor Perry mengeksplorasi Asia dan menemukan Jepang. Kemudian pada tahun 1930, hubungan antara kedua negara sempat tegang karena Jepang mengambil langkah militeristik dengan mengirimkan pasukannya ke Manchuria sebagai bagian dari kebijakan ekspansionisme Jepang pada saat itu. Hal ini berlanjut sampai kedua negara berperang dan kemudian Jepang kalah dalam peperangan.

Pasca perang dunia II usai, hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat berada dalam posisi bersahabat. Kedua negara sepakat untuk menandatangani kesepakatan aliansi untuk membantu satu dengan yang lain dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Dalam



periode perang dingin, Amerika Serikat yang berfokus pada perang Korea mengisyaratkan Jepang untuk membentuk badan keamanan sebagai upaya dalam mengantisipasi komunisme di Asia. Jepang yang kala itu mencoba untuk menjadi negara pasifis mulai berubah menjadi negara militeristik yang ditandai dengan perubahan badan keamanan menjadi badan militer hingga saat ini.

Pada masa kepemimpinan Barrack Obama secara resmi menyatakan bahwa Asia adalah "prioritas utama" untuk diplomasi Amerika. Kebijakan ini dikenal luas sebagai "poros ke Asia" dan mengumumkan Amerika berencana untuk menempatkan sejumlah kecil Marinir di Darwin, Australia. Di sisi lain, Jepang menghadapi kemelut yang rumit di Asia Timur, kebangkitan militer China serta agresifitas China dengan mengklaim pulau di Laut China Timur dan Laut China Selatan membuat Jepang merasa di rugikan. Pada masa kepemimpinan Shinzo Abe, Jepang mengambil langkah progresif menyusul kebangkitan China di kawasan Asia Timur. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat kerjasama pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat dalam bingkai pakta pertahanan Jepang-Amerika Serikat.

Penelitian ini secara umum mencoba menggambarkan bagaimana dinamika antara Jepang dan Amerika Serikat mulai dari zaman pra perang dunia II sampai dengan pemerintahan Obama. Namun, penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana Jepang menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat Amerika Serikat secara global, sehingga penelitian ini hanya sebatas kebijakan umum bukan kebijakan militer. Selain itu, dalam penelitian ini penulis belum mengemukakan bagaimana pengaruh yang diberikan oleh aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat sejak dibentuk hingga saat ini.

### **2.2.5 Buku "The Evolution of US-Japan Alliances : The Eagle and The Chrysanthemum"**

**Penulis : Matteo Dian**

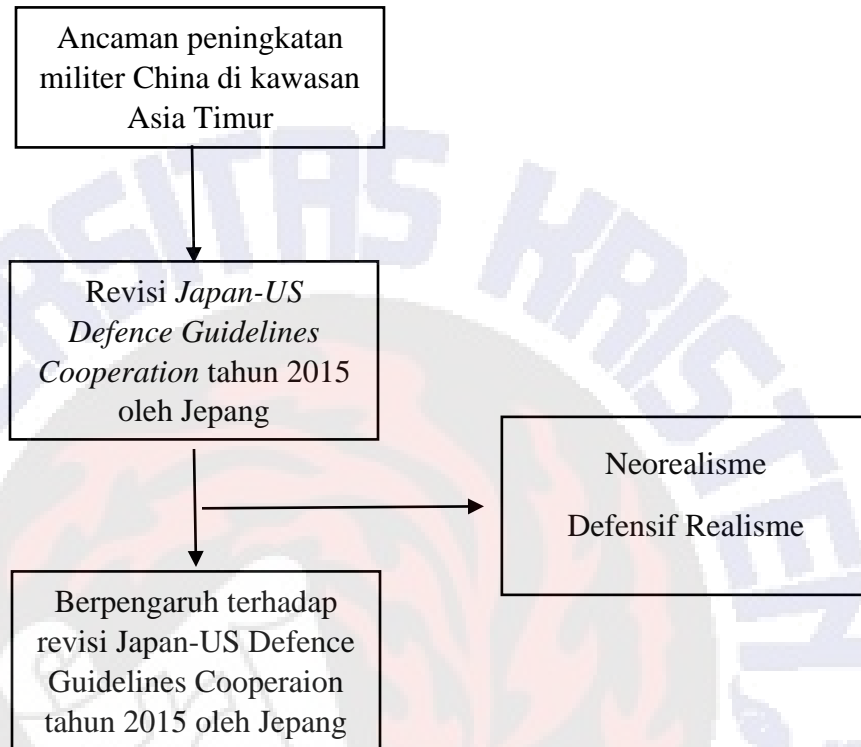
Dalam penelitian ini, secara umum penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mempertahankan kepentingan dan kontrolnya serta pada yang sama mencoba untuk mempersiapkan Jepang menjadi negara sekutu yang mandiri (alianse Jepang-Amerika Serikat). Penulis mencoba mengemukakan bagaimana kemudian negara dengan kekuatan besar Amerika Serikat masuk dalam regional Asia dan memberikan dampak terhadap perkembangan negara Jepang. Dalam sejarahnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang sudah terjalin sejak lama hingga kemudian kedua negara ini sepakat membentuk aliansi. Aliansi Amerika

Serikat-Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi keamanan Jepang sampai saat ini.

Penulis dalam Buku ini memaparkan lebih dalam mengenai evolusi aliansi Jepang serta melihat perkembangan aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang dan juga perubahan strategi keamanan Jepang dari tahun 1960 hingga 2013. Penulis mengemukakan, aliansi Amerika Serikat-Jepang telah menjadi saksi dalam kebangkitan dan kejatuhan ideologi pasifisme yang dianut Jepang pasca perang dunia kedua atau yang sering dikenal dengan Doktrin Yoshida (Yoshida Shigeru yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang), yang merupakan kebijakan Jepang dengan menggunakan prinsip perdamaian. Namun, prinsip pasifisme yang dianut Jepang terancam pasca perang dingin selesai, berbagai macam faktor telah mempengaruhi prinsip pasifisme yang dibangun Jepang setelah perang dunia kedua. Jepang telah meninggalkan identitasnya sebagai “negara damai” dan telah mengubah dirinya menjadi “negara normal” (militeristik) serta yang semakin dekat dengan Amerika Serikat. Memasuki era baru, Jepang tidak lagi mampu menahan tekanan Amerika Serikat untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam aliansi. Bahkan, Peningkatan militer China dengan agresifitasnya membuat Jepang semakin tergantung terhadap aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang.

Penelitian ini sangat baik dalam menjelaskan evolusi Jepang menjadi negara militeristik sejak perang dunia II berakhir. Selain itu, penulis juga secara jelas menyebutkan bahwa pada dasarnya keamanan Jepang sangat bergantung dengan Amerika Serikat, mulai dari terbangunnya badan keamanan hingga sampai sekarang. Namun, dalam penelitian ini tidak secara jelas memperlihatkan secara konkrit bagaimana pengaruh China terhadap revisi *Guidelines* antara Jepang dengan Amerika Serikat. Kemudian, penelitian ini juga belum menjelaskan mengenai pengaruh yang di dapatkan Jepang sebagai negara yang di dorong untuk mandiri oleh Amerika Serikat sehingga penelitian ini kurang maksimal.

### 2.3 Kerangka Penelitian



#### Penjelasan Singkat Kerangka Berpikir

Di dalam situasi internasional yang anarki, suatu negara akan selalu skeptis dalam melihat kebijakan yang dikeluarkan negara sekitarnya. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan militer China yang dilakukan di kawasan Asia Timur membuat Jepang sebagai negara berdaulat harus mengambil langkah progresif guna mencegah dan menindaklanjuti kebijakan China tersebut. Revisi ulang mengenai *Guidelines* pada tahun 2015 antara Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu langkah yang diambil Jepang dalam merespon kebijakan China sehingga Jepang dapat menghadapi ancaman peningkatan militer China di Kawasan Asia Timur.